

**REKAPITULASI
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN PPID DAN REGULASI (SOP) INTERNAL**

UPDATED: 6 JUNI 2011

No.	BADAN PUBLIK	PPID	REGULASI
BADAN PUBLIK NEGARA			
01.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SK Menkominfo No. 117/Kep/M.Kominfo/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	Peraturan Menkominfo No. 10/Per/M.Kominfo/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
02.	Kementerian Kehutanan	SK.No. 50/Menhut-II/2011 ttg PPID Lingkup Kementerian Kehutanan.	Permenhut No. P.7/Menhut-II/2011 ttg Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
03.	Mahkamah Agung	SK KMA No. 144 Tahun 2007	SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan Surat Edaran No. 6 Tahu 2010 tentang Instruksi Impelementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan.
04.	Kepolisian RI	No: Sprin/133/1/2010	Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia
05.	Kementerian Perhubungan	SK Menhub No. KP.16 Tahun 2011 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.	Peraturan No. 72 Tahun 2010 tentang SOP Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
06.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	SK Menbudpar No. KM.70/OT.001/MKP/2010	
07.	Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan	SKEP No. 299/Ses/Polhukham/05/2010	
08.	Arsip Nasional RI	SK No. HK.01/141/2010	
09.	DPR RI	SK Seken DPR No.140/SEKJEN/2011 tentang Tim Pengelola Informasi dan	Peraturan DPR No. 1 Tahun 2010 ttg Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI.

		<p>Dokumentasi Informasi Publik Setjen DPR.</p> <p>SK Sekjen No. 141/SEKJEN/2011 tentang Tim Layanan Informasi pada Setjen DPR.</p> <p>SK Sekjen No. 689/Sekjen/2011 tentang Perubahan atas SK No. 866/Sekjen/2010 tentang Penetapan PPID Setjen DPR.</p> <p>SK Sekjen No. 139/Sekjen/2011 ttg Tim Penyelesaian Sengketa Informasi Pulik pada Setjen DPR.</p>	
10.	Komisi Pemilihan Umum	SK No. 23 Tahun 2010	
11.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Permen No. 31 Tahun 2011
12.	LIPI		
13.	Kementerian Dalam Negeri		Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentai di Lingkungan Kemendagri
14.	Kementerian Perindustrian	Draft (finalisasi)	Draft (finalisasi)
15.	Kementerian Pertanian	Menunggu penetapan	Draft
16.	Kementerian Pertahanan	Sudah ditunjuk, yaitu Puskom Publik, tetapi SK belum diterima KIP	Penyempurnaan konsep Permenhan
17.	Mahkamah Konstitusi	SK Sekjen MK No. 008.6/Kep/SET.MK/2011 tgl 3 Januari 2011	
18.	Kementerian Luar Negeri	SK Menlu No. 20/B/KP/III/2011/01 tentang Penunjukan PPID Kementerian Luar Negeri	Drafting
19.	Menko Kesra		Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2010
20.	Kementerian Hukum dan HAM	SK Setjen No. Sek.5.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengelolaan dan Pelayanan	Peraturan Menteri No. M.HH.-04.IN.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan

		Informasi Sekretariat Jenderal	Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan HAM.
21.	Kementerian Kesehatan	SK No. 708/Menkes/SK/VI/2010 tentang PPID	
22.	DPD RI	Ada (janji mau dikirim melalui kurir)	Ada (janji mau dikirim melalui kurir)
23.	Badan Pemeriksa Keuangan	SK masih dalam proses kajian pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum)	Masih dalam proses penyusunan
24.	Setneg	Tahap penyempurnaan untuk pengesahan	Diselenggarakan Biro Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat
25.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	SK No. 99/KPAI/VI/2011 tentang Pembentukan PPID KPAI, tanggal 6 Juni 2011.	
26.	Kementerian Pekerjaan Umum		SOP permintaan informasi sudah dibuat dalam website.
BADAN HUKUM NON-NEGARA			
1.	Yayasan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)	PPID sudah ditunjuk (penjelasan lisan dari PPIDnya).	
2.	ICW		
3.	Yayasan Tifa		
4.	YAPPIKA		
5.	Kontras		
6.	LeIP		
7.	YLBHI		
8.	LBH Masyarakat		
9.			
PEM. PROVINSI			
01	Nanggroe Aceh Darussalam	SK Gubernur Aceh No. 480/590/2010 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, tanggal 27 Sept. 2010	Diperoleh dari sosialisasi di Aceh
02.			

Data

Respons Badan Publik terhadap Surat Komisi Informasi Pusat tanggal 25 April 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan bahwa PPID dan Peraturan Internal belum dibentuk karena perubahan struktur organisasi. Tetapi mekanisme perolehan informasi sudah ada dimuat dalam website. Direspons pada 27 April 2011.
2. Kementerian Perhubungan, 26 April 2011. PPID dan Peraturan Internal sudah dibentuk. Bahkan menyampaikan informasi ada permintaan informasi dari pemohon. KIP belum mempunyai naskah SK dan Peratuannya. Follow up minta SK Menperhub No. KP.16 Tahun 2010 dan Permenhub No. PM 72 Tahun 2010.
3. Kementerian Luar Negeri, 27 April 2011. PPID sudah dibentuk berdasarkan SK Menlu No.20/B/KP/III/2011/01. Peraturan internal masih disusun. SK PPID belum diperoleh KIP. Perlu disurati kembali.
4. Kementerian Lingkungan Hidup, 3 Mei 2011. Menyatakan PPID dan Peraturan internal belum dibuat. Berjanji diselesaikan paling lambat 20 Agustus 2011.
5. Kementerian Pertahanan RI, 29 April 2011. Menyatakan PPID sudah terbentuk, tetapi dasar hukum penunjukan tidak disebut. Peraturan internal lagi digodok. Disampaikan pula bahwa Kemenhen sudah melakukan sosialisasi UU KIP. Naskah Permenhan sedang disempurnakan. Perlu dikirimkan surat permohonan SK dasar hukum PPID.
6. Kementerian Pertanian, 29 April 2011. PPID dan regulasi internal masih digodok.
7. Kementerian Kehutanan, 2 Mei 2011. PPID dan regulasi internal sudah ada. Naskah SK dan Permenhut juga dikirimkan.
8. Setjen DPR, 28 April 2011. PPID dan regulasi internal sudah ada, dan dikirimkan semua.
9. Mahkamah Konstitusi melalui faks langsung mengirimkan naskah SK PPID.
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6 Mei 2011. PPID dan regulasi internal sudah ada. Follow up kirim surat minta naskah SK dan Peraturan.
11. Kementerian Perindustrian, 6 Mei 2011. Draf SK PPID dan regulasi internal sedang finalisasi. KIP sudah punya draf regulasi internal.
12. Kementerian Kesehatan. PPID sudah terbentuk. Sedangkan regulasi internal sedang dalam proses finalisasi.

REKAPITULASI PERKEMBANGAN PPID DI DAERAH

No.	Daerah	Dasar Hukum
01.	Kabupaten Tana Toraja	SK Bupati No. 736/V/2011 tentang PPID pada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemkab Tana Toraja tertanggal 5 Mei 2011.
02.	Kotamadya Surakarta	SK Walikota Surakarta No. 042.05/01-B/1/2001 tentang Penunjukan PPID Pemkot Surakarta tanggal 3 Januari 2011
03.	Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur	SK No. 188.45/37/Kpts/433.013/2011 tentang Penunjukan PPID di Lingkungan Pemkab Bangkalan, tanggal 21 Februari 2011
04.		

05.		
06.		
07.		